

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan simpulan dan saran dengan hasil penelitian dan analisis data mengenai “Analisis Strategi Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA Negeri Pasca Pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Jambi.”

5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan pada BAB IV disimpulkan bahwa pemerataan guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum dapat dikatakan baik karena masih terjadi tumpang tindih antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sehingga masih ada beberapa guru mata pelajaran yang menumpuk di beberapa sekolah menengah pertama. Penumpukan guru terjadi dikarenakan kurang tegasnya dari Dinas Pendidikan terkait dengan penetapan jumlah guru untuk setiap sekolah. Melihat formasi pengangkatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah seakan-akan tidak membuat komposisi guru menjadi merata. Dalam penataan dan pemerataan guru disini penulis mencoba strategi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota Pontianak yaitu: 1) Penugasan satuan pendidikan; 2) Membuat perencanaan kebutuhan guru; 3) Perhitungan kebutuhan guru.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase ketimpangan sebaran guru berdasarkan standar rasio di Provinsi Jambi sebagai berikut: (1) 28 % SMAN di Provinsi Jambi memiliki kekurangan guru yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota dengan tingkat kekurangan 3.9 %, dengan rincian sebagai berikut Mata pelajaran

Sosiologi sebanyak 70 orang, Geografi 79 orang, Bahasa Inggris sebanyak 52 orang, MTK 26 orang, PKN 46 orang, Sejarah 63 orang dan Bimbingan Konseling 123 orang; (2) 39 % SMAN di Provinsi Jambi perlu ditata ulang yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dengan tingkat kelebihan mencapai 11.7 %, dengan rincian Biologi di 4 Kabupaten/Kota, Fisika di 3 Kabupaten/Kota, Kimia di 6 Kabupaten/Kota, Ekonomi di 6 Kabupaten/Kota, Bahasa Indonesia di 3 Kabupaten/Kota, Pendidikan Jasmani di 3 Kabupaten/Kota dan TIK di 4 Kabupaten/Kota;

Strategi yang digunakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu merujuk kepada juknis peraturan bersama lima menteri tentang pemerataan guru pegawai tahun 2011, Strategi yang diterapkan sangat perlu diperhatikan akan lebih baik mengadopsi strategi yang sudah dilakukan di daerah lain yang tingkat budaya dan sosial guru yang hampir sama di Provinsi Jambi seperti strategi yang sudah diterapkan di beberapa daerah sebagai contoh kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dengan strategi yang telah dikembangkan oleh *United States Agency for International Development* yaitu program bantuan yang mengkaji tentang pendidikan Indonesia.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan guru di Provinsi Jambi ini yaitu *Faktor pendukung*: Produk Hukum, Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan Pendekatan yang dilakukan Dinas Pendidikan yang bersifat *ownership*. *Faktor penghambat*: Jumlah peserta didik dan rombongan belajar terlalu sedikit, Jam pelajaran dalam kurikulum sedikit, Jumlah guru di satu sekolah untuk mata pelajaran tertentu terlalu banyak, Sekolah Swasta

Mengangkat Guru Sendiri, dan Tiap Sekolah Sama-Sama Kelebihan Guru Pada Mata Pelajaran Yang Sama.

5.2 Saran

Hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendidikan Propinsi Jambi, sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu mengaudit data base yang ada agar data yang sebenarnya dapat diperoleh dengan baik dari lembaga sekolah serta memiliki ketegasan terkait dengan penetapan jumlah guru untuk setiap sekolah dikarenakan masih banyak sekolah yang belum memiliki guru sesuai dengan mata pelajarannya dan masih banyak guru sertifikasi belum terpenuhi jam wajib mengajarnya.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan sebaiknya perlu membuat suatu desain strategi yang lebih kompleks guna penataan dan pemerataan guru yang sebaik-baiknya.
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu memaksimalkan faktor-faktor pendukung agar keterlaksanaan penataan dan pemerataan guru dapat dilakukan sebaik-baiknya.